BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tahun 2010 merupakan tantangan bagi perekonomian dunia, tak terkecuali bagi negara berkembang seperti Indonesia, karena adanya pasar bebas bagi perdagangan dunia. Batas-batas geografis menjadi semakin tidak berarti, demikian pula dengan masalah bea cukai yang biasanya menjadi penghalang, tidak akan menjadi masalah lagi karena pada perdagangan bebas, bea masuk akan dihapuskan. Sekarang saatnya perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bertahan dalam pasar yang sulit ini. Untuk dapat terus bertahan, tentu saja perusahaan harus memiliki sebuah strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasional, serta meningkatkan nilai-nilai yang ada di dalam perusahaan itu sendiri (<http://www.kompas.com>).

Salah satu strategi yang dapat diterapkan oleh perusahaan adalah *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang mudah diwacanakan, tapi masih berat dilaksanakan. Terbukti, sejak Komite Nasional Kebijakan GCG (kini berubah menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance*/KNKG) mengeluarkan pedoman GCG pada 2001, jumlah institusi publik dan BUMN yang serius menerapkan konsep ini masih memprihatinkan (SWA, 2007). Mas Achmad Daniri, -Ketua KNKG-, menyebutkan dalam SWA (2007) bahwa hal itulah yang membuat geram pengurus KNKG. Padahal, target yang dicanangkan KNKG ingin menempatkan Indonesia pada kuartil teratas dalam pemeringkatan internasional *Good Governance* pada 2009.

Corporate Governance juga merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan GCG menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan GCG menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat (<http://www.google.com>).

Mendorong perusahaan menerapkan GCG bukanlah hal yang mudah. Menurut Jos Luhukay (Ketua Subkomite Korporasi) dalam Daniri (2007), bahwa salah satu penyebabnya adalah belum adanya wasit yang tegas untuk program ini. Regulator tidak bisa dijadikan satu sebagai wasit. Sehingga dalam rencana mendatang KNKG akan memprioritaskan pelaksanaan GCG di perusahaan yang menghimpun atau menggunakan dana publik dalam jumlah besar, seperti kelompok perbankan, dana pensiun, perusahaan publik dan BUMN. Pelaksanaan GCG di masing-masing kelompok tersebut tentu akan sangat bergantung pada peran regulator masing-masing. Contoh peran regulator perbankan adalah Bank Indonesia dan peran regulator pasar modal ada Bapepam. Jos Lukuhay dalam Daniri (2007) juga mengungkapkan bahwa sekarang sudah saatnya para regulator tersebut di-*rating*, bukan hanya perusahaannya saja.

Sedangkan menurut Suratman (2000), menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi GCG menyebabkan ketidaktahuan perusahaan akan asas manfaat GCG, sehingga penerapan GCG masih rendah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Marwati (2007) yang menggambarkan bahwa peserta GCG *Awards* masih sangat sedikit. Fenomena ini memberikan gambaran bahwa publik masih acuh dengan

manfaat penerapan GCG. Manfaat mikro GCG bagi perusahaan ujung-ujungnya memang efisiensi dan produktivitas. Sebab produktivitas dan efisiensi usaha adalah jawaban menghadapi kompetisi global di tengah situasi yang tidak stabil. Sedangkan secara makro GCG bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, seluruh perusahaan di Indonesia menerapkan GCG maka secara otomatis membantu perbaikan ekonomi negara dan masyarakat.

Sebagai contoh konkrit yaitu, penerapan GCG dalam praktiknya menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dari manajemen perusahaan. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan apa yang didapat. Hal ini, menurut Wahjudi dalam Khomsiyah (2000), menghindari inefisiensi dan *opportunity cost* yang tidak perlu. Sementara itu, guna menjamin efektifitas GCG diperlukan suatu cara. Hal itu harus dilakukan secara kolektif oleh pekerja-pekerja di dalam tingkatan yang berbeda. Upaya melakukan GCG dapat dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan menyadari perannya untuk mewujudkan GCG.

Merujuk pada Satyo (2000), berikut setidaknya bentuk-bentuk peran yang dapat diambil oleh para manajer, akuntan manajemen, dan auditor internal dalam mendukung terwujudnya GCG di perusahaan. Para manajer perusahaan dapat berperan secara efektif terhadap GCG dengan melakukan tindakan-tindakan antara lain:

1. Mengidentifikasi secara layak, mengevaluasi, dan mengelola resiko dan peluang;
2. Menindaklanjuti kebijakan perusahaan dan menjelaskan tujuan perusahaan secara lengkap;
3. Menaati standar-standar etika; dan

4. Memandang dewan direksi perusahaan sebagai “ahli” dan kewenangan legalnya diakui.

Akuntan Manajemen dapat berperan dalam:

1. Memberikan system informasi atas penilaian kinerja masa lalu dan aktivitas masa depan yang disetujui dan direncanakan;
2. Merancang dan menerapkan *internal control system* yang berperan sebagai dewan penjamin;
3. Menjamin bahwa pendelegasian kewenangan ditaati; dan
4. Mengawasi dan mengevaluasi biaya-biaya serta manfaat-manfaat dari aktivitas utama.

Auditor Internal dapat berperan dalam:

1. Membantu dewan dalam menilai resiko utama dan memberi nasehat pada pihak manajemen;
2. Mengevaluasi internal control system dan bertanggung jawab kepada komite audit;
3. Menelaah peraturan GCG minimal setahun sekali.

Mengingat dampak krisis finansial global sangat mempengaruhi kelangsungan usaha (*going concern*) serta dapat menurunkan kinerja perusahaan, maka auditor internal tidak boleh hanya berpangku tangan saja menjadi penonton, namun diharapkan dapat turut serta secara aktif membantu manajemen meminimalisasi dampak krisis finansial global yang mungkin timbul di perusahaan. Paling tidak terdapat 3 (tiga) peran yang dapat dilakukan oleh auditor internal dalam menghadapi dampak krisis finansial global sebagai berikut (<http://muhariefeffendi.wordpress.com>) :

1. Mendorong terwujudnya GCG secara efektif.

Auditor internal dapat berperan dalam mendorong terwujudnya GCG di perusahaan. Beberapa hal yang perlu mendapat dukungan penuh dari auditor internal, misalnya :

- Mendorong transparansi (*transparency*) dan integritas (*integrity*) dalam pelaporan keuangan (*financial reporting*) perusahaan.
- Mendorong akuntabilitas (*accountability*) dalam pengelolaan aset perusahaan.
- Mendorong pertanggungjawaban (*responsibility*) perusahaan kepada publik melalui *Corporate Social Responsibility /CSR, Community Development* atau Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL).
- Mendorong independensi (*independency*) perusahaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk pemegang saham minoritas.
- Mendorong kewajaran (*fairness*) dalam pengadaan barang & jasa termasuk dipastikannya tidak ada pelanggaran terhadap UU anti monopoli & persaingan usaha yang sehat.

2. Melaksanakan audit yang bernilai tambah dengan pendekatan audit berbasis risiko, dengan tujuan agar auditor internal dapat:

- Memberikan analisis operasional secara obyektif & independen.
- Menguji berbagai fungsi, proses dan aktivitas suatu organisasi serta *external value chain*.

- Membantu organisasi dalam merancang strategi bisnis yang obyektif.
 - Melakukan *assesment* secara sistematis dengan pendekatan multidisiplin.
 - Melakukan evaluasi & menilai efektivitas *risk management* , *control* & *governance processes*.
3. Melaksanakan pencegahan, pendeteksian & penginvestigasian kecurangan.

Auditor internal berfungsi membantu manajemen dalam pencegahan (*prevention*), pendeteksian (*detection*) dan penginvestigasian (*investigation*) kecurangan (*fraud*) yang terjadi di suatu organisasi (perusahaan). Sesuai Interpretasi Standar Profesional Audit Internal (SPAI) – standar 120.2 tahun 2004, tentang pengetahuan mengenai kecurangan, dinyatakan bahwa auditor internal harus memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas tentang “Analisis Peranan Auditor Internal Dalam Keefektifan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada PT Bank X Tbk.”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengambil identifikasi masalah yaitu “Sejauh mana peranan auditor internal dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG)?”

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana peran auditor internal suatu perusahaan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peranan auditor internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Bagi perusahaan yang diteliti, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana peranan auditor internal dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), sehingga dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna dan dapat dikembangkan untuk penelitian serupa.